

## **Kolaborasi *Stakeholder* Dalam Penyelesaian Konflik di Tahura Sulawesi Tengah**

**Maria<sup>1)</sup>, Golar dan Sudirman Dg Massiri<sup>2)</sup>**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Pertanian Pascasarjana Universitas Tadulako

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Magister Ilmu Pertanian Pascasarjana Universitas Tadulako  
mariosofiana93@yahoo.co.id

### **Abstract**

*Many parties have an interest in forest resources in Central Sulawesi. Some are in line with or against the conservation goals. In the context of preservation of Central Sulawesi Forest Park, it is necessary to take joint action in formulating policies, harmonizing the interests of the community and the management of Central Sulawesi. This research aims to identify the role of stakeholder in the management and utilization of forest Resources in Forest Park, analyze problem and formulate collaborative patterns of conflict resolution. The research was conducted in Januari-March 2019. The research applied data collection techniques through interviews with respondents taken by purposive sampling method, including those who had an interest in managing Forest Park, Ngatabaru Village community, Ngatabaru Village government, field officers and the parties of Forest Park Regional Technical Executing Unit. Data analysis used the matrix of influence and interests Reedet al, (2009), classifies stakeholders into key players, context setters, subject and crowd. The stakeholder analysis model with three stages of stakeholder identification, stakeholder classification, and describing stakeholder relationships. The results show that 12 stakeholder had different levels of influence and interest in the management and utilization in Forest Park. There are 4 stakeholder groups in (key player), 2 stakeholders (Subject), 4 stakeholders (Context Setter), and 2 stakeholder (Crowd). The level of stakeholder relations has the opportunity to establish cooperation. But the actual relationship between stakeholder in the management of Central Sulawesi tends to be weak. The results of data analysis show that there is a problem of lack of synchronization and coordination. With this, it is necessary to realize a pattern of collaboration that has high importance in the Central Sulawesi Forest Park area. Building a shared vision unites different viewpoints of those who agree, respect each other, and provide benefits so that sustainable and sustainable management of Central Sulawesi will be achieved.*

**Keywords:** Stakeholder Collaboration, Conflict Resolution, Central Sulawesi Forest Park

### **PENDAHULUAN**

Tahura merupakan salah satu kawasan lindung yang berada di antara Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Hutan ini merupakan kawasan konservasi yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Sulawesi Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 24/Kpts-II/1999 tanggal 29 Januari 1999. Potensi yang dimiliki Tahura Sulteng membuat banyak pihak untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki Tahura Sulteng. Kepentingan banyak pihak tersebut cukup beragam, ada yang sejalan dan ada pula yang bertentangan dengan tujuan konservasi. Keberadaan

desa dan kelurahan di sekitar kawasan hutan masih memiliki ketergantungan hidup yang tinggi dengan kawasan hutan. Hal ini diketahui masih adanya aktivitas pemanfaatan sumber daya hutan, baik pemanfaatan hasil hutan maupun lahan, khususnya masyarakat Dusun Tompu yang berada di Desa Ngatabaru Kabupaten Sigi. Menurut (Lahandu, dkk, 2016), Masyarakat setempat telah mengklaim keberadaan mereka lebih dahulu ada sebelum penetapan kawasan hutan Tahura Sulteng . Pemanfaatan kawasan Tahura Sulteng berlangsung cukup lama di Desa Ngatabaru, sehingga berdampak terhadap kerusakan hutan, turunnya kualitas dan kuantitas air yang terjadi pada Embung Ngia di Desa Ngatabaru. Oleh karena itu dalam rangka pelestarian Tahura Sulteng perlu menjadi hasil tindakan bersama dengan menyusun kebijakan dalam mengharmonisasi antara kepentingan masyarakat, dan pengelola Tahura Sulteng.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi peran *stakeholder* terhadap pengelolaan pemanfaatan SDH di Tahura Sulteng kemudian menganalisis masalah dalam pelaksanaan kolaborasi pengelolaan di Tahura Sulteng sehingga dapat merumuskan pola kolaborasi dalam penyelesaian konflik di Tahura Sulteng. Manfaat dari kejelasan peran para pihak kemudian mengetahui kendala pelaksanaan kolaborasi dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi rumusan pola kolaborasi pengelolaan Tahura terhadap penyelesaian konflik di Tahura Sulteng.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ngatabaru, dengan pertimbangan bahwa sebagian besar masyarakatnya masih memiliki tingkat ketergantungan dalam pemanfaatan lahan dan adanya klaim tenurial masyarakat adat dusun tompu yang berada dalam kawasan hutan Tahura Sulteng. Penelitian dilakukan selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Februari 2019 sampai bulan April 2019. Bahan yang digunakan adalah kuesioner dan peta lokasi Tahura Sulteng. Pengambilan sampel dilakukan dengan menetapkan responden secara sengaja (*purposive sampling*). Dimana sampel tersebut adalah masyarakat Desa Ngatabaru, tokoh masyarakat atau pemerintah Desa Ngatabaru, petugas lapangan

dan pihak UPTD. Tahura serta stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan Tahura Sulteng. Data penelitian terdiri dari data primer dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara (*interview*) kepada sejumlah informan kunci sedangkan data sekunder meliputi data potensi desa dan Tahura Sulteng antara lain data geografi, demografi, keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat, studi literatur dan dokumen dari para pihak/instansi berupa penggunaan dan pengelolaan Tahura Sulteng. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan kunci yang memahami permasalahan terjadi dalam pengelolaan kawasan Tahura Sulteng. Teknik analisis data menggunakan analisis *stakeholder* dengan melihat tingkat pengaruh dan kepentingan. Dimana pengaruh terdiri dari kekuatan yang dimiliki oleh *stakeholder* terhadap Tahura, Sementara kepentingan terdiri dari hal utama yang diberikan Tahura untuk memenuhi keinginan dari setiap stakeholder. Model analisis *stakeholder* menggunakan *Reed, (2009)* dengan tiga tahapan meliputi identifikasi *stakeholder*, klasifikasi *stakeholder*, dan menggambarkan hubungan antar *stakeholder*. Identifikasi stakeholder dilakukan untuk mengetahui *stakeholder* yang terlibat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDH di Tahura Sulteng. Menurut (*Reed, 2009*) metode analisis matriks pengaruh dan kepentingan yaitu dengan mengklasifikasikan *stakeholder* ke dalam kelompok *key player, context setter, subject* dan *crowd*. Matriks pengaruh dan kepentingan disusun berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan kunci yang dibentuk berupa skoring kemudian dikelompokkan menurut klasifikasi *stakeholder* tersebut. Penetapan skor menggunakan pengukuran data berjenjang 5 oleh *Abbas, (2005)*.

**Tabel 2. Penilaian kualitatif pengaruh dan kepentingan *stakeholder***

No	Skor Nilai	Kriteria	Keterangan
<b>Pengaruh <i>Stakeholder</i></b>			
1	0-5	Rendah	Tidak mempengaruhi pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura
2	6-10	Kurang Tinggi	Kurang mempengaruhi pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura
3	11-15	Cukup Tinggi	Cukup mempengaruhi pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura

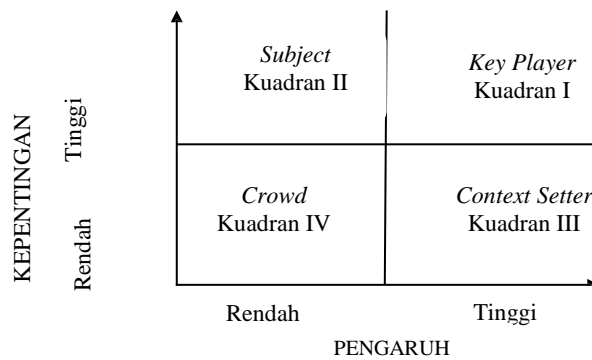
4	16–20	Tinggi	Mempengaruhi pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura
5	21–25	Sangat Tinggi	Sangat mempengaruhi pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura
<b>Keentingan Stakeholder</b>			
1	0-5	Rendah	Tidak mendukung pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura
2	6–10	kurang tinggi	Kurang mendukung pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura
3	11–15	Cukup Tinggi	Cukup mendukung pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura
4	16–20	Tinggi	Mendukung pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura
5	21–25	Sangat Tinggi	Sangat mendukung pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura

Penilaian tahap pengaruh *stakeholder* berbentuk lima pertanyaan diajukan melalui wawancara kepada informan kunci, yaitu: (P1): Bagaimana kondisi kekuatan yang dimiliki *stakeholder* terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDH di kawasan Tahura ? (P2): Bagaimana kondisi kelayakan *stakeholder* terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDH di kawasan Tahura ? (P3): Bagaimana kondisi kompensasi *stakeholder* terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDH di kawasan Tahura? (P4): Bagaimana kondisi kepribadian *stakeholder* terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDH di kawasan Tahura? (P5): Bagaimana kondisi kekuatan organisasi kelembagaan *stakeholder* terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDH di kawasan Tahura?

Menurut Reed *et al*, (2009) dalam Oktavia, (2013) Tingkat kepentingan setiap *stakeholder* diukur menggunakan variable mencakup keterlibatan *stakeholder*, manfaat yang diperoleh *stakeholder*, bentuk upaya *stakeholder*, program kerja *stakeholder* dan tingkat ketergantungan *stakeholder* terhadap pengelolaan kawasan Tahura Sulteng. Pengukuran tingkat kepentingan *stakeholder* dalam pengelolaan Tahura berbentuk lima pertanyaan yang diajukan melalui wawancara, diantaranya (K1): Bagaimana bentuk keterkaitan *stakeholder* terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDH di kawasan Tahura? (K2): Apa manfaat yang *stakeholder* terima terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDH di Kawasan Tahura? (K3): Bagaimanakah upaya *stakeholders*

terhadap adanya pengelolaan dan pemanfaatan SDH di kawasan Tahura? (K4): Apa strategi *stakeholder* terkait adanya pengelolaan dan pemanfaatan SDH di kawasan Tahura Sulteng ? (K5): Bagaimanakah tingkat bergantungnya *stakeholder* terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDH di Tahura Sulteng?

Dari beberapa skor yang didapatkan setiap *stakeholder* ialah pengaruh bernilai 25 poin dan kepentingan 25 poin. Hasil klasifikasi analisis *stakeholder* menurut tingkat pengaruh dan kepentingan dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2. Matriks pengaruh dan kepentingan (Reed *et al.* 2009)**

Kesuksesan kerja bersama seperti yang diceritakan Wakka, (2015), merupakan pelajaran dan pengkayaan metodologi yang berharga dalam perkembangan pendekatan kolaborasi. Akan tetapi, dalam strategi kolaborasi tidak selamanya berjalan sesuai yang diinginkan (Gray, 1989). Maka dengan tujuan penelitian yang kedua dan ketiga menggunakan analisis deskriptif dengan menggambarkan kata-kata dalam penyajiannya.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Konflik Tahura Sulteng**

Konflik muncul dengan adanya perbedaan pandangan atau kepentingan. Akibat dari perbedaan tujuan antara pihak satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan rasa ketidak nyamanan. Menurut Kilman dan Thomas (1978), terjadinya konflik kerana tidak sependapatnya nilai atau tujuan yang

ingin dicapai, baik yang ada dalam diri seseorang maupun yang ada kaitannya dengan orang lain. Beberapa Isu konflik yang teridentifikasi di kawasan Tahura Sulteng khususnya di Desa Ngatabaru yaitu: Konflik Tenurial, klaim masyarakat. Konflik Tahura berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat yang tergantung dengan sumberdaya hutan pada sekitar kawasan (Golar *et al*, 2014). Kegiatan illegal di kawasan Tahura dengan adanya penggunaan lahan okupasi alih fungsi lahan oleh masyarakat Desa Ngatabaru. Kemudian perambahan seperti perbekebunan, peternakan, berkaitan dengan masalah kehidupan seperti pemanfaatan hasil hutan seperti pengambilan kayu untuk dijadikan arang. Menurut Grimble, (1997) banyak inisiatif konservasi gagal karena mereka tidak memperhatikan interests dan karakteristik pemangku kepentingan. Beberapa hal yang bisa dikaji dalam mengoptimalkan peran *stakeholder* terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDH di Tahura, pihak mana saja yang memiliki pengaruh dan kepentingan kemudian dilibatkan dalam pelaksanaan aturan mengenai Tahura Sulteng.

### ***Stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Sulteng***

Pengelolaan Tahura Sulteng ditentukan dengan peran *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dan pengaruh terhadap kawasan Tahura Sulteng. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap *stakeholder* yang mempunyai kepentingan di kawasan ditemukan 12 *stakeholder*. Antara lain Balai Wilayah Sungai Sulawesi III; Dinas Kehutanan Slteng; Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VI Palu; UPTD Tahura; Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan; Penyuluh Pertanian; Pemerintah Desa; Masyarakat Desa Ngatabaru; Kelompok Tani Hutan; Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

### **Entitas Kelompok Pemerintah**

Pengelolaan Tahura Sulteng tidak terlepas dari kewenangan pemerintah daerah, *stakeholder* yang berasal dari kelompok pemerintah, antara lain, Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai peran penting dalam pengelolaan Tahura Sulteng, peran

Dishut Sulteng sesuai dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2015 adalah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tahura Sulteng adalah kelompok *stakeholder* yang bertugas dan mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan teknis operasional atau penunjang Dinas di bidang pengelolaan Tahura. UPTD Tahura dalam PERDA No. 2 Tahun 2015 tentang pengelolaan Tahura Sulteng mempunyai peran antara lain melakukan perencanaan, perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan dan Penyuluh Pertanian mempunyai peran dalam peningkatan taraf hidup masyarakat Desa Ngatabaru. Pada kawasan Tahura Desa Ngatabaru terdapat waduk air yang merupakan satu satunya sumber air bersih untuk masyarakat. Balai Wilayah Sungai Sulawesi III mempunyai peran dalam pengelolaan dan penyediaan air bersih untuk masyarakat Desa Ngatabaru dan pasokan air untuk pengembangan wisata alam Kapopo. Jika mengacu pada PERDA No 2 Tahun 2015 tentang pengelolaan Tahura Sulteng maka peran *stakeholder* ini sangat berpengaruh terhadap kelestarian ekosistem dan pengembangan wisata Kapopo. Namun, selama ini pelaksanaan program kolaborasi pengelolaan Tahura belum terjalin membangun pola kemitraan atau kolaborasi aktif *stakeholder* berdasarkan fungsi dan kedudukannya dalam mendukung pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA).

### **Entitas Kelompok Masyarakat**

Kecenderungan masyarakat dalam melakukan aktivitas di dalam kawasan Tahura dikarenakan dinamika perekonomian masyarakat. Kelompok masyarakat terdiri dari masyarakat Desa Ngatabaru dan Kelompok Tani Hutan Desa Ngatabaru, kedua stakeholder ini mempunyai kepentingan dan ketergantungan tinggi terhadap kawasan Tahura sehingga pemberian akses sangat dibutuhkan untuk pengelolaan kawasan hutan untuk kelangsungan hidup masyarakat sekitar. Berdasarkan PERDA No. 2 Tahun 2015 pemberian akses pemanfaatan adalah diberikan izin untuk membuat pemungutan hasil hutan bukan kayu di blok pemanfaatan, izin pemanfaatan tradisonal dan izin penguasaan jasa

wisata alam. Namun, setelah dilakukan penelitian secara actual didalam kawasan Tahura masih dijumpai aktivitas perambahan hutan seperti pencurian fasilitas yang ada di Tahura.

### **Entitas Kelompok Perguruan Tinggi**

Perguruan Tinggi mempunyai peran dalam penelitian dan pengembangan ilmu serta pemdampingan kepada masyarakat. Perguruan Tinggi mempunyai Hak untuk melakukan penelitian dalam kawasan Tahura Sulteng dengan ketentuan harus mempunyai izin penelitian. Izin penelitian yang diberikan berjangka 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan. Pemegang izin penelitian dapat menggunakan sarana dan prasaran yang telah disediakan oleh pihak UPTD Tahura Sulteng. Meskipun demikian, sebagaian peneliti menganggap bahwa pembatasan waktu yang diberikan belum memadai.

### **Entitas Kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan *stakeholder* yang mempunyai peran dalam pengelolaan Tahura. Peran dari *stakeholder* ini adalah melakukan pendampingan hak-hak masyarakat. Pendampingan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan kawasan Tahura Sulteng. Klasifikasi *stakeholder* dalam pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura dibedakan menurut tingkat pengaruh dan kepentingan. Pengukuran tingkat pengaruh *stakeholder* dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tahura Sulteng menerapkan 5 variabel mencakup kekuatan kondisi, kelayakan, kompensasi, individu dan organisasi (Reed *et al.* 2009).

**Tabel 7: Hasil nilai tingkat pengaruh *stakeholder***

No	Stakeholder	Nilai					Total
		P1	P2	P3	P4	P5	
1	Balai Wilayah Sungai Sulawesi III	4	2	1	5	4	16
2	Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VI Palu	5	0	2	5	4	16
3	Dinas Kehutanan Sulteng	5	5	5	4	5	24
4	UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	5	5	3	3	3	19



5	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	3	1	2	5	2	13
6	Penyuluh Pertanian	4	4	3	3	3	17
7	Pemerintah Desa Ngatabaru	3	3	2	2	2	12
8	Masyarakat Desa Ngatabaru	5	5	4	4	4	22
9	Kelompok Tani Hutan	2	3	1	1	1	8
10	Lembaga Adat Setempat	2	3	0	3	3	11
11	Perguruan Tinggi	4	5	3	2	3	17
12	Lembaga Swadaya Masyarakat	2	2	2	2	1	9

Tingkat kepentingan *stakeholder* diukur dalam pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura dengan 5 variabel meliputi keterlibatan *stakeholder*, manfaat yang diperoleh *stakeholder*, bentuk kewenangan *stakeholder*, program kerja *stakeholder* dan tingkat ketergantungan *stakeholder*.

**Tabel 8: Hasil nilai tingkat kepentingan *stakeholder***

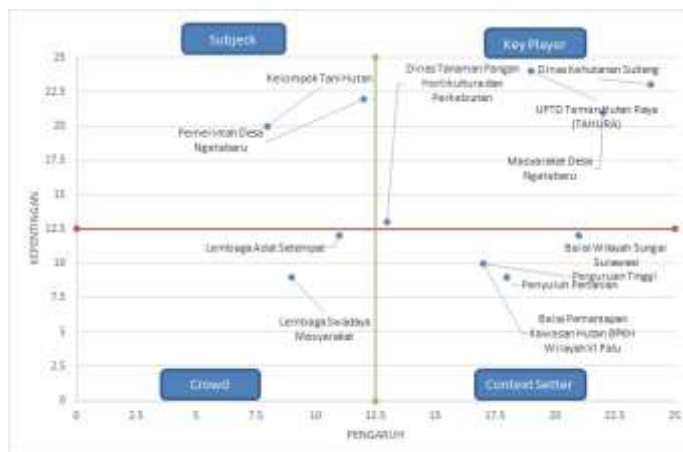
No	Stakeholder	Nilai					Total
		K1	K2	K3	K4	K5	
1	Balai Wilayah Sungai Sulawesi I II	3	3	2	2	2	12
2	Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VI Palu	2	1	3	4	0	10
3	Dinas Kehutanan Sulteng	5	4	5	4	5	23
4	UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	5	5	4	5	5	24
5	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	3	3	2	5	0	13
6	Penyuluh Pertanian	2	2	2	2	1	9
7	Pemerintah Desa Ngatabaru	5	5	4	4	4	22
8	Masyarakat Desa Ngatabaru	4	5	4	4	4	21
9	Kelompok Tani Hutan	4	5	3	4	4	20
10	Lembaga Adat Setempat	2	2	3	2	3	12
11	Perguruan Tinggi	2	2	2	2	2	10
12	Lembaga Swadaya Masyarakat	2	2	2	2	1	9

Ketergantungan masyarakat Desa Ngatabaru akan kawasan Tahura memiliki intensitas yang cukup tinggi. Intensitas yang tinggi disebabkan akses menuju kawasan Tahura mudah untuk diakses masyarakat, selain itu potensi nilai ekosistem atau nilai ekonomi dikawasan Tahura cukup tinggi dan mudah untuk dimanfaatkan dan dipasarkan. selain masyarakat beberapa *stakeholder* juga mempunyai pengaruh dan kepentingan dalam pemanfaatan kawasan Tahura. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Dinas Kehutanan (Dishut) sebagai perpanjangan tangan Gubernur Sulawesi Tengah mempunyai tugas melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian. Dari PERDA No. 2 Tahun 2015 teridentifikasi bahwa Dishut

mempunyai pengaruh dan kepentingan yang tinggi terhadap kebijakan pemanfaatan sumberdaya Tahura. Selain Dishut, UPTD Tahura juga merupakan stakeholder yang mempunyai pengaruh dan kepentingan yang tinggi dalam pemanfaatan Tahura. Pengaruh dan kepentingan yang tinggi dijabarkan dalam PERDA No. 2 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa UPTD Tahura mempunyai tugas dan fungsi melakukan perencanaan, perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan. Berdasarkan matriks *Reed et al. (2009)* pada Gambar 3(tiga) membuktikan bahwa masing-masing *stakeholder* memiliki klasifikasi berbeda sesuai dengan tingkat pengaruh dan kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura Sulteng.

**Peran *Stakeholder* dalam Pengelolaan dan pemanfaatan Sumberdaya Hutan di Tahura Sulteng**

Hasil identifikasi beberapa stakeholder yang mempunyai kepentingan dalam kawasan Tahura dan juga mempunyai peran terkait resolusi konflik, *stakeholder* yang teridentifikasi memiliki peran posisi yang berbeda menyikapi pengelolaan dan pemanfaatan SDH Di Tahura Sulteng.



**Gambar 3. Hasil Analisis Matriks pengaruh dan kepentingan *stakeholder***

Secara khusus pada Gambar 3 di atas menunjukkan hasil yang sebanding dengan kondisi faktual di tempat penelitian. Secara rinci berikut dijelaskan:

**Key player** adalah kelompok pihak yang mempunyai kepentingan dan pengaruh tinggi terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDH di Tahura Sulteng, maka dianggap paling berperan dalam penyelesaian konflik di Tahura. Pihak yang tergolong dalam kelompok *key player* ialah Dinas Kehutanan, UPTD. Tahura, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Masyarakat Desa Ngatabaru. **Subject** adalah sekelompok pihak yang memiliki kepentingan tinggi tapi pengaruhnya rendah. dalam ketegori subjek stakeholder mempunyai kekuatan kecil untuk mengubah situasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di Tahura, akan tetapi mereka dapat mempengaruhi *stakeholder* lain jika dapat berkerja sama maupun berkolaborasi dengan *Stakeholder* lainnya. Kelompok *stakeholder* yang termasuk dalam subject adalah pemerintah Desa Ngatabaru dan Kelompok Tani Hutan. **Context setter** adalah kelompok *stakeholder* yang pengaruhnya tinggi tetapi memiliki sedikit kepentingan. *Stakeholder* ini harus selalu diperhatikan karena dapat berubah menjadi *stakhoders* yang berperan dalam mempengaruhi *stakeholder* lainnya. Beberapa stakeholder pada kelompok *context setter* ialah Perguruan Tinggi, Balai Wilayah Sungai Sulawesi III, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) VI Palu, dan Penyuluh Pertanian. **Crowd** adalah kelompok pihak yang pengaruh dan kepentingannya rendah terhadap pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura Sulteng, Namun demikian tetap menjadi pertimbangan untuk diikutsertakan dalam pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah dan juga mempunyai peran yang dibutuhkan dalam pengelolaan. *Stakeholder* yang termasuk dalam kelompok *crowd* adalah Lembaga swadaya masyarakat dan Lembaga Adat setempat.

### **Tingkat Hubungan Antar Pemangku Kepentingan atau *Stakeholder***

Mendalami hubungan antar *stakeholder* dibutuhkan untuk melihat tingkat hubungan keterkaitan antar *stakeholder* atau pemangku kepentingan yang berperan dalam kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura Sulteng digambarkan dalam tabel hubungan aktor dengan menggunakan kata kunci yaitu peluang hubungan kerjasama, saling mengisi, dan potensi konflik

(Nurtjahjawilasa, dkk. 2015). Kemudian dijelaskan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan gambaran tentang pola hubungan stakeholder pada tabel 9.

**Tabel 9. Pola hubungan stakeholder dalam pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura**

	BPKH Wilayah VI Palu	Dishut	UPTD Tahura	Dinas TPHP	Penyuluh Pertanian	Pemdes Ngatabaru	Masy. Ngatabaru	Klmpk Tani Hutan
Balai WSS III BPH	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	2;3	1;2
Wilayah VI Palu		1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2
Dishut			1;2	1;2	1;2	1;2	1;2;3	1;2;3
UPTD Tahura				1;2	1;2	1;2	1;2;3	1;2;3

Berdasarkan hasil analisis data, Hubungan antar *stakeholders* dalam pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura *stakeholder* mempunyai peluang dalam menjalin kerja sama. Kerjasama antar stakeholder tersebut dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik yang sulit dipecahkan dalam pengelolaan kawasan Tahura. Permasalahan utama dalam pengelolaan Tahura adalah tidak adanya keterbukaan antar masyarakat dan pemerintah. *Stakeholder* yang mempunyai tujuan yang sama dalam kawasan Tahura memiliki peluang untuk berkolaborasi, akan tetapi secara aktual jalinan antar masyarakat pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan Tahura Sulteng mengarah dengan rendahnya pelibatan masyarakat sekitar kawasan Tahura sehingga peranan kontribusi terhadap upaya konservasi wilayah Tahura tergolong rendah.

### Masalah-masalah dalam pelaksanaan strategi kolaborasi Tahura Sulteng

Strategi kolaborasi juga dikenal dengan istilah jembatan agar dapat meningkatkan pengelolaan SDA (Suporahardjo, 2005). Dari hasil analisis data dilapangan menunjukkan bahwa terdapat pokok masalah sehingga kolaborasi pengelolaan Tahura tidak berjalan **Pertama**, antara pihak Dishut, UPTD. Tahura, Masyarakat Desa Ngatabaru dan Kelompok Tani belum menemukan kepentingan bersama. Kolaborasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan bila berhasil menyatukan Common ground (pandangan yang sama). **Kedua**, kurangnya interaksi antara pihak pengelola Tahura dengan kelompok masyarakat Desa Ngatabaru. Pihak masyarakat Desa Ngatabaru kurang

diikutsertakan dalam seluruh kegiatan pengelolaan kawasan Tahura dalam hal Interaksi yang intensif dalam proses pembuatan keputusan. **Ketiga**, masyarakat Desa Ngatabaru tidak mendapatkan kontribusi. Padahal proses kolaborasi memerlukan adanya sharing antara pelaksana dengan kelompok sasaran sehingga bisa mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat. **Keempat**, kurangnya regulasi pendanaan.

### **Pola Kolaborasi Penyelesaian Konflik Tahura Sulteng**

Untuk memahami pola kolaborasi stakeholder dalam penyelesaian konflik pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura perlu respon dari pihak penentu kebijakan sebagai upaya dalam melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan dengan dilakukan visioning membangun hubungan visi bersama dengan menyatukan perbedaan sudut pandang demi tercapainya solusi. Berdasarkan hasil kajian pihak yang terlibat mempunyai pengaruh dan kepentingan tinggi terhadap pengelolaan Tahura Sulteng yang memiliki peran kapasitas terhadap pengelolaan Tahura Sulteng dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan Tahura belum berjalan. Setelah dievaluasi selama ini tidak ada sinkronisasi maupun koordinasi dalam program pengelolaan Tahura Sulteng antara masyarakat sekitar kawasan Tahura Sulteng dengan pihak yang memiliki kapasitas terhadap pengelolaan Tahura Sulteng. Berdasarkan P.43/Menlhk/Setjen/kum.1/6/2017 tentang pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat agar tercapainya pengelolaan Tahura Sulteng yang lestari dan berkelanjutan. Dengan dekonstruksi itu dapat dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat lokal, pengintegrasian kegiatan konservasi, pengaturan akses dalam pemanfaatan dan pengelolaan Tahura secara adil.

## KESIMPULAN

*Stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDH di Tahura adalah Balai Wilayah Sungai Sulawesi III, Dinas Kehutanan Slteng, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VI Palu, UPTD Tahura, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan, Penyuluh Pertanian, Pemerintah Desa, Masyarakat Desa Ngatabaru, Kelompok Tani Hutan, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Beberapa stakeholder tersebut mempunyai tingkat pengaruh dan kepentingan yang berbeda dalam pengelolaan Tahura. Stakeholder yang mempunyai jumlah pengaruh dan kepentingan tertinggi yaitu UPTD. Tahura, dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. Peran *stakeholder* tersebut masih sangat rendah terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di Tahura Sulteng. Permasalahan dalam pelaksanaan kolaborasi pengelolaan di Tahura yaitu koordinasi antar pihak masih rendah, tata kelola dan dukungan kontribusi serta pembagian peran cenderung membuat pengelolaan Tahura tidak berjalan secara efektif. Kolaborasi antar *stakeholder* dalam penyelesaian konflik di Tahura Sulteng dibutuhkan program solusi kemitraan konservasi dengan melibatkan stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi di sekitar kawasan Tahura Sulteng, menyamakan persepsi dan identifikasi kebutuhan setiap *stakeholder*, kejelasan penyusunan rencana pengelolaan Tahura yang lestari dan mensejahterakan masyarakat sekitar kawasan hutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengakui bahwa dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, petunjuk dan arahan maupun masukan yang membangun dari berbagai pihak terutama kepada orang tua dan Universitas Tadulako. Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan bermanfaat dan mendorong lahirnya karya ilmiah yang lebih baik dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas. 2005. Mekanisme perencanaan partisipasi *stakeholder* Taman Nasional Gunung Rinjani. [disertasi]. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Golar, Toknok, B., Sustris, Rahman Abdul, dan Maiwa Arman. 2014. Dokumen Studi Kelayakan Pembangunan Agrowisata Kawasan Tahura Palu [tidak dipublikasikan]. PT. Amara Tera. Palu.
- Gray, Barbara. 1989. *Collaborating: Finding common ground for multiparty problems*. San Francisco, CA: Jossey-Bass
- Grimble, R. and K. Wellard. 1997. *Stakeholder methodologies in natural resource management: A review of concepts, contexts, experiences and opportunities*. *Agric. Systems* 55:173–193.
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 24/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan TAHURA SULTENG
- Kilman, R.H. and Thomas, K.W. 1978. *Four Perspectives on Conflict Management : An Attributional framework for Organizing descriptive and normative theory*. *Academy of Management Review*
- Lahandu, Jamlis, Rudy C. Tarumingkeng, dan Hariadi Kartodihardjo. 2016. Analisis Kebijakan Pengelolaan Akses Sumberdaya Alam Oleh Masyarakat Kaili Di Taman Hutan Raya (Tahura) Sulteng. *J.Agrisains*. 17 (1): 24-33. Universitas Tadulako. Palu
- Nurtjahjawilasa, Kartodihardjo Hariadi, Ridho N Dodik, dan Justianto Agus. 2015. “Analisis Pemangku Kepentingan Dalam Kebijakan Pengelolaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan” *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 12 (3): 235-248
- Oktavia, Siska dan Saharuddin. 2013. *Hubungan Peran Stakeholders Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Agropolitan Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor*. *Jurnal Sosiologi Pedesaan* Vol. 01, No. 03. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat IPB. Bogor
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah.
- Reed, M.S, A. Graves, N. Dandy, H. Posthumus, K. Hubacek, J. Morris, C. Prell, C.H. Quinn, L.C. Stringer. 2009. Who’s In And Why? A Typology Of *Stakeholder Analysis Methods For Natural Resource Management*. *Journal of Environmental Management* 90 (2009) 1933–1949. Elsevier.

Suporahardjo. 2005. *Manajemen Kolaborasi. Memahami Pluralisme Membangun Konsensus*. Bogor. Pustaka LATIN.

Wakka, A.K. Muin dan Purwanti. 2015. "Menuju Pengelolaan Kolaborasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Provinsi Sulawesi Selatan". *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea Vol. 4 No.1: 41 – 50*